

---

## SOSIALISASI PEMADANAN NIK MENJADI NPWP DI UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

Indah Kurniyawati<sup>1</sup>, Rosdiyati<sup>2\*</sup>, dan Abidah Dwirahmi Satiti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Akuntansi, Universitas Islam Lamongan  
Jl. Veteran 53A, Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

<sup>1</sup>[indah.kurnia5@unisla.ac.id](mailto:indah.kurnia5@unisla.ac.id)

<sup>2</sup>[Rosdiyati@unisla.ac.id](mailto:Rosdiyati@unisla.ac.id)

<sup>3</sup>[abidahdwirahmi@unisla.ac.id](mailto:abidahdwirahmi@unisla.ac.id)

### Abstrak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PKM) No. 112 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ Mulai tanggal 14 Juli 2022, setiap Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan warga negara yang memiliki Nomor Induk Kependudukan harus melakukan pemadanan NIK. Minimnya informasi mengenai pemadanan NIK-NPWP menjadikan perlu adanya sosialisasi mengenai pemadanan tersebut. Karena dari seluruh total dosen dan karyawan tendik di lingkungan Unisla hanya 10% yang telah melaporkan SPT tahunannya dan hanya 5% yang telah melakukan pemadanan NIK. Hal inilah yang menjadi dasar dari masalah yang diangkat di proposal Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Melalui sosialisasi ini dosen dan karyawan tendik di lingkungan Universitas Islam Lamongan dapat mempraktekkan secara langsung di situs <https://djponline.pajak.go.id/account/login> untuk pemrosesan validasi NIK sebagai identitas pengganti NPWP. Melalui sosialisasi ini, diharapkan dosen dan karyawan tendik di lingkungan Universitas Islam Lamongan diberikan keadilan dan kepastian hukum dalam bidang perpajakan guna pengurusan NIK sebagai identitas.

Kata Kunci: pemadanan, NIK, pajak, NPWP, PPh 21

### Abstract

*Based on Minister of Finance Regulation (PKM) No. 112 of 2022 Article 2 paragraph (1) which states that "Starting from July 14, 2022, every individual taxpayer who is a citizen who has a Resident Identification Number must match the NIK. The lack of information about matching NIK-NPWP makes it necessary to socialize about this matching. Because of the total lecturers and staff in Unisla, only 10% have reported their annual SPT and only 5% have matched NIK. This is the basis of the issues raised in this Community Service proposal. Through this socialization, lecturers and staff members at the Islamic University of Lamongan can practice directly on the website <https://djponline.pajak.go.id/account/login> to process NIK validation as a replacement identity for NPWP. Through this socialization, it is hoped that lecturers and staff members within the Islamic University of Lamongan will be given justice and legal certainty in the field of taxation for managing NIK as an identity.*

*Keywords: matching, NIK, Tax, NPWP, PPh 21*

## I. PENDAHULUAN

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Dyrenge et al., 2014; Pulintansari et al., 2016), namun kini diganti menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia (Pasal 1 angka 1 PMK-112 Tahun 2022). Berdasarkan UU No 6 Tahun 1983 Tentang KUP sttd UU No 7 tahun 2021 Pasal 2 ayat (1a) menyebutkan “Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan”. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PKM) No. 112 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Sedangkan Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dosen dan karyawan tendik sebagian besar merupakan subyek pajak PPh 21 dimana wajib pajak tersebut wajib melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Minimnya informasi mengenai pemadanan NIK-NPWP menjadikan perlu adanya

sosialisasi mengenai pemadanan tersebut. Hal inilah yang mendasari dan melatarbelakangi permasalahan yang diangkat dalam proposal Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Melalui sosialisasi ini dosen dan karyawan tendik di lingkungan Universitas Islam Lamongan dapat mengaplikasikan langsung di situs <https://djponline.pajak.go.id/account/login> proses validasi NIK sebagai identitas pengganti NPWP. Dan diharapkan kedepannya masyarakat sebagai Wajib Pajak orang pribadi dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NIK sebagai identitas (Nadia & Kartika, 2020a; Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan satu data Indonesia, perlu mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan (Amelia & Machfiroh, 2017; Herryanto & Toly, 2013).

Permasalahan yang ditemukan pada mitra dan harus diatasi telah dijelaskan dalam pendahuluan. Namun akan diulas lagi sebagai berikut :

1. kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia
2. kurangnya informasi ketentuan baru dalam dunia perpajakan

Permasalahan pertama merupakan bagian dari permasalahan lainnya dan kedua permasalahan ini saling terkait. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi

masalah tersebut akan dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut.

Berdasarkan permasalahan diatas maka solusi permasalahan yang akan dilaksanakan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

Solusi untuk semua permasalahan dalam pengabdian ini adalah memberikan pelatihan Teknik pajak bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi DJP secara maksimal sehingga memudahkan dosen dan karyawan tendik di Universitas Islam Lamongan dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta memberikan informasi ketentuan baru dalam dunia perpajakan(Nadia & Kartika, 2020b).

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (N. Wulandari, 2006). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wulandari & Suyanto, 2014). Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Ayu & Sari, 2017).

## II. METODE

Metode pelaksanaan pada pengabdian di Universitas Islam Lamongan adalah dengan menggunakan metode *Participation Group* dengan menggunakan

empat tahapan yaitu : observasi, kesediaan mitra, *forum group discussion* dan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Dengan adanya pemberian sosialisasi, diskusi bersama mengenai pentingnya pemadanan NIK dan pelaporan SPT tahunan untuk menunjang pembangunan negara serta dilakukan guna memberikan kesadaran kepada para wajib pajak agar lebih taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Empat tahapan yang akan dilakukan pada pengabdian kali ini adalah :

1. Observasi, melakukan observasi guna melihat masalah yang terjadi. Berdasarkan pengamatan, masalah yang terjadi adalah para dosen dan tendik yang berada di lingkungan Universitas Islam Lamongan kurang faham mengenai pemadanan NIK dan pelaporan SPT tahunan.
2. Kesediaan mitra, pada kesempatan kali ini tim dari KPP Lamongan dan tim Tax Center Universitas Islam Lamongan mendapat kesediaan dari mitra yaitu Rektor Universitas Islam Lamongan untuk di jadikan mitra dalam rangka kegiatan PKM dengan melakukan sosialisasi perpajakan.
3. *Forum group discussion*, pada tahapan ini tim dari KPP Lamongan dan tim Tax Center Universitas Islam Lamongan melakukan diskusi, observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap para peserta sosialisasi.
4. *Evauasi*, evaluasi dari pelaksanaan PKM adalah dilakukannya penilaian

dan wawancara. Dengan evaluasi ini, maka para dosen dan tendik di lingkungan Universitas Islam Lamongan dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan lebih meningkatkan lepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat ini Universitas Islam Lamongan terdapat 230 dosen dan 107 karyawan tendik. Dari total keseluruhan dosen dan karyawan tendik di Universitas Islam Lamongan hanya sekitar 10% (terdiri dari 25 orang dosen dan 9 orang karyawan tendik) yang telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pelaporan terhadap SPT tahunannya dan hanya 5% (17 orang dosen) yang telah melakukan pepadanan NIK (data dari KPP Lamongan per tanggal 28 Februari 2023).

Pada awal bulan Maret 2023 dengan dukungan penuh dari KPP lamongan dan tim tax center Universitas Islam Lamongan, melakukan pendataan terhadap dosen dan karyawan tendik di Universitas Islam Lamongan yang telah memenuhi dalam persyaratan melakukan kewajiban perpajakan, terutama pajak terhadap PPh pasal 21. Ada sekitar 157 jumlah dosen dan keryawan tendik yang telah memenuhi persyaratan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap PPh 21. Dari data tersebut telah diberikan surat undangan sosialisasi pepadanan NIK dan pelaporan SPT tahunan. Pada berlangsungnya acara

dari total undangan yang telah disebarakan terdapat 15% dari total undangan yang tidak dapat menghadiri acara sosialisasi tersebut dengan berbagai alasan.



Gambar 1 Pembukaan sosialisasi pepadanan NIK dan Pelaporan SPT Tahunan

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, bahwa penyebab adanya keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan adalah masalah login di akun DJP. Pada dasarnya mereka lupa akan alamat email, efin dan password untuk akun pajak mereka. Dengan adanya sosialisasi ini, para wajib pajak dapat melakukan konsultasi langsung dengan pihak KPP lamongan dan tim tax center unisversitas Isalam Lamongan.

Pada saat konsultasi para wajib pajak akan diberikan pelatihan secara khusus *one by one* tata cara pepadanan NIK dan pelaporan SPT tahunan. Sehingga para wajib pajak merasa lebih leluasa dalam melakukan pepadanan NIK dan pelaporan SPT tahunan serta lebih santai dalam melakukan konsultasi mandiri.



Gambar 2 Konsultasi wajib pajak dengan dibantu tim tax center Universitas Islam Lamongan



Gambar 3 Konsultasi wajib pajak dengan dibantu KPP Lamongan

Dari hasil pengabdian ini diketahui bahwa para dosen dan karyawan tendik di lingkungan Universitas Islam Lamongan kurang patuh dalam pelaporan SPT PPh 21 Tahunannya. Kegiatan PKM tentang sosialisasi pemadanan NIK dan pelaporan SPT tahunan ini penting karena dapat membantu para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan sosialisasi pemadanan NIK dan pelaporan PPh 21 yang telah dilaksanakan di Universitas Islam

Lamongan serta pembahasan pada materi sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah para dosen dan karyawan tendik, Sebagian besar kurang memahami mengenai bagaimana cara melakukan pemadanan NIK. Mereka merasa kesulitan dalam mengakses situs <https://dijonline.pajak.go.id/account/login>. hal ini berimbas pada kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan, karena ada masalah tersebut, mengakibatkan pelaporan SPT tahunan PPh 21 mengalami keterlambatan. Sebagian besar mereka kehilangan password untuk mengakses dan kehilangan efin mereka.

Dengan adanya sosialisasi pemadanan NIK dan pelaporan SPT tahunan ini, diharapkan para dosen dan karyawan tendik di lingkungan Universitas Islam Lamongan lebih paham mengenai hak dan kewajiban perpajakannya serta lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N., & Machfiroh, S. ines. (2017). PELAPORAN PERPAJAK AN DI DESA SAMB ANG AN KABUPATEN TANAH LAUT. *Mediteg*, 2(1).
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). PENGARUHTAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2).
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2014). Tax avoidance corporate. *American Accounting Association*,

- 83(1), 61–82.  
<https://www.jstor.org/stable/30243511>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020a). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497.  
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020b). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497.  
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Putri Lopian Ayu Intansari, P., Endahjati, S., & Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, U. (2016). *TAX AMNESTY*. 4(DESEMBER).  
[www.kemenkeu.go.id/apbn2016](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016)
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak I N F O A R T I K E L. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* (Vol. 2, Issue 2).
- Wulandari, N. (2006). Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Fokus Ekonomi*, 1(2), 120–136.
- Wulandari, T., & Suyanto. (2014). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Jurnal Akuntansi*, 2(2).

#### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

#### **Indah Kurniyawati, S.E., M.A**

Lahir di Lamongan, 23 Agustus 1984. Staf pengajar di Universitas Islam Lamongan. Studi S1 Akuntansi di Universitas Airlangga, Surabaya, lulus tahun 2009; S2 Akuntansi di Universitas Airlangga, Surabaya, lulus tahun



2015

**Rosdiyati, S.E., M.SA**



Rosdiyati, lahir di Lamongan, 5 November 1984. Menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas pembangunan Nasional "Veteran" pada tahun 2002. S2 Magister Sains Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia lulus tahun 2015 Saat ini aktif mengajar sebagai dosen tetap pada Universitas Islam Lamongan untuk program Studi Akuntansi.

**Abidah Dwirahmi Satiti, S.Pd., M.Pd**



Lahir di Surakarta, 7 Desember 1989. Staf pengajar di Universitas Islam Lamongan Prodi Akuntansi. Studi S1 Pendidikan Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta, lulus tahun 2012; S2 Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, lulus tahun 2015, dan sedang menempuh S3 Program Doktor Ilmu Ekonomi Peminatan Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

